

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal yang telah berjalan di Indonesia sejak tahun 2001 diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi wajah pemerintahan di Indonesia. Pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah. Pada saat yang bersamaan, keberadaan politisi dalam lingkup pemerintahan yang lebih kecil, melahirkan sifat-sifat politisi yang diasumsikan memiliki pengaruh buruk pada performa penyediaan barang publik. *Public Sector Efficiency* menjadi sudut pandang untuk melihat bagaimana pemerintah dapat mengatur keuangannya diukur dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sifat politisi yang memiliki kerabat menjabat di pemerintahan atau dapat disebut dengan dinasti politik dibandingkan dengan politisi non-dinasti politik kepada *Public Sector Efficiency*. Dengan menggunakan *two-stage DEA analysis*, penelitian ini menemukan nilai efisiensi pada tahapan pertama. Selanjutnya, penelitian ini menemukan pengaruh yang ambigu dari sifat politisi terhadap *Public Sector Efficiency*, yang dimana sifat politisi tidak berpengaruh terhadap *Public Sector Efficiency*. Sementara, kemampuan pemerintah yang diproksikan melalui Tingkat Kemandirian Daerah, dan *Total Factor Productivity* memiliki pengaruh positif terhadap *Public Sector Efficiency*.

Kata Kunci : *Public Sector Efficiency*, Tingkat Kemandirian Daerah, *Total Factor Productivity*, Dinasti Politik, *Two-Stage DEA Analysis*, *Single Bootstrap Truncated Regression*.